

Lampiran I : Surat Bupati Cirebon

Nomor : 130.1/01/Pem

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penyusunan LPPD Kabupaten Cirebon dan LKPJ Bupati Cirebon
Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

SISTEMATIKA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon
2. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan Keuangan

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

C. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan)
2. Urusan Pemerintahan Umum
3. Prestasi-prestasi

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2020

F. PENUTUP

G. LAMPIRAN

Keterangan :

1. Menggunakan kertas F4;
2. Diketik menggunakan huruf Arial dan ukuran *font* 12;
3. *Margin* :
 - a. Kiri : 4 cm
 - b. Kanan : 3 cm
 - c. Atas : 3 cm
 - d. Bawah : 4 cm
4. Nomor halaman ditempatkan di tengah bagian bawah kertas;
5. Jarak antara paragraf / kalimat (*spasi*) : 1,5

Lampiran II : Surat Bupati Cirebon

Nomor : 130.1/01/Pem

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penyusunan LPPD Kabupaten Cirebon dan LKPJ Bupati Cirebon
Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA KUNCI

(IKK)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

Lampiran III: Surat Bupati Cirebon

Nomor : 130.1/01/Pem

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penyusunan LPPD Kabupaten Cirebon dan LKPJ Bupati Cirebon
Tahun Anggaran 2021

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD**

TAHUN ANGGARAN 2021



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra.Hj.ITA ROHPITASARI,M.Si**

NIP : 19660810 198709 2 001

Pangkat : Pembina Utama Muda

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan IKK LPPD Tahun Anggaran 2021 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber, 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Dra.Hj. ITA. ROHPITASARI. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198709 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) ini, disusun berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program pembangunan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

Kami berharap LPPD dan LKPJ ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sumber, 03 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon,

Dra.Hj.ITA ROHPITASARI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon	1
2. Kebijakan Umum dan Pengelolaan Keuangan	9
B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..	10
1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	10
C. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	11
D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13
1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan)	17
2. Urusan Pemerintahan Umum	27
3. Prestasi-prestasi	47
E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2020 ...	48
F. PENUTUP	50

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah. Dalam sektor pertanian Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak dijalur pantura. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak disepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegecik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108o 40' – 108o 48' Bujur Timur dan 6o 30' – 7 o 00' Lintang Selatan, yang dibatasi oleh : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu. 2. Sebelah barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

Wilayah Kecamatan yang terletak sepanjang jalur pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki letak ketinggian antara 0 –

10 m dari permukaan air laut, sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki letak ketinggian antara 11 – 130 m dari permukaan laut. Faktor iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pantai terutama daerah bagian utara, timur, dan barat, sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah perbukitan. Kabupaten Cirebon dilalui oleh 18 aliran sungai yang berhulu di bagian selatan. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Cirebon yang tergolong besar antara lain Cisanggarung, Ciwaringin, Cimanis, Cipager, Pekik, dan Kalijaga. Pada umumnya, sungai-sungai besar tersebut dipergunakan untuk pengairan pesawahan disamping untuk keperluan mandi, cuci dan sebagai kakus umum. Lokasi : $108^{\circ}40'$ – $108^{\circ}48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan Luas (daerah administrasi) : 990,36 Km² Ketinggian (dari permukaan laut) : 0 – 130 m Jarak Terjauh : Barat – Timur 54 Km Utara – Selatan 39 Km.

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 Desa dan 12 Kelurahan. Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga Kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (pemekaran Kecamatan Klangeran sebelah timur), Kecamatan Suranenggala (pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah selatan) dan Kecamatan Greged (pemekaran Kecamatan Beber sebelah timur) Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten-kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 adalah sebanyak 2.162.576 jiwa dan dengan luas wilayah administratif 990,36 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.316 jiwa per Km². kota kecamatan dan daerah perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa dan lain-lain. Dari total penduduk sebanyak 2.162.576 jiwa diantaranya adalah perempuan sehingga rasionya adalah 101,31. Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per Kecamatan hingga pada Tahun 2020 masih menunjukkan kondisi kurang

merata seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumber yaitu sebanyak 86.313 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 3,76 % dan yang terkecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 28.217 jiwa (sebaran penduduk sebesar 1,23 %). Kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah kecamatan yang tidak sama.

Capaian Indeks Pertumbuhan ekonomi,Infrastruktur wilayah Dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2020

Jumlah Penduduk	: 2.162.576 Jiwa
Indeks Pembangunan Manusia	: 68,42 Poin
Tingkat Penggauran Terbuka	: 10,56 %
Angka Kemiskinan	: 9,94 %
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	: 5,02 %
Inflasi	: 2,00 %
Indeks Gini	: 0,402 Poin
Kondisi Jalan Mantap	: 1.009,637 Km/81,4%
Intensitas Tanam(CROP INTENSITY INDEKS)	: 251,64 Poin
Rumah Tangga yang Terakses Air Bersih	: 482.814 KK / 68,64%
Rumah Tangga yang Bersanitas	: 531.127 KK / 75,51%
Indeks Pendidikan	: 55,73 Poin

Indeks Kesehatan	: 79,20 Poin
------------------	--------------

VISI DAN MISI KABUPATEN CIREBON

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun Anggaran 2021, berikut merupakan capaian kinerja dalam RKPD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 Dan 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	Target 2021	Capaian 2021	KET.
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Bakesbang
	Cakupan koordinasi antar lembaga terkait pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Bakesbang
	Persentase lembaga agama, sosial, adat yang diedukasi tentang peraturan politik kebangsaan dan kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Bakesbang
	Persentase lembaga sosial yang dibina berbasis wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Bakesbang
	Cakupan pembinaan kerukunan umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	Bakesbang

Visi

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu
**“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

Misi

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA :
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA :
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS :
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
4. Kabupaten Cirebon MAJU
Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
5. Kabupaten Cirebon AMAN :
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan

Sebagaimana visi dan misinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rasa aman, tentram dan tertib bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon;
- b. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, beretika dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Meningkatnya masyarakat yang agamis dan berwawasan kebangsaan;
- d. Meningkatnya kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- a. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan melalui FORKOPIMDA
- b. Mengedepankan peran serta masyarakat dalam penyelesaian konflik serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama untuk berperan serta dalam proses berwawasan kebangsaan dan pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Memfasilitasi dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/LSM
- e. Monitoring perkembangan situasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Dalam rangka mempertajam program-program Badan kesatuan bangsa dan politik, Visi dan Misi serta Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut di atas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 beserta realisasinya sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON**

1. Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Tugas Pokok : Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Daerah di Bidang Hubungan Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Fungsi :

<ol style="list-style-type: none"> a. b. c. 	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, Pengembangan demokrasi, dan Hubungan Lembaga;
--	--

- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan kantor;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran Strategis :
Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Sumber Data (Internal & Eksternal)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang telah direalisasikan dibagi jumlah administrasi perkantoran yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang telah direalisasikan dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol
		Terwujudnya peningkatan disiplin pakaian aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya yang terealisasi dibagi Jumlah target pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dikali 100%	Kesbangpol
		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja, semesteran dan tahunan SKPD	Kesbangpol
		Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan sectoral	Tepat waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan SKPD	Kesbangpol
2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan	Perbandingan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada kondisi awal dengan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada tahun berikutnya	Kesbangpol

3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Tingkat partisipasi : perbandingan jumlah pemilih dengan jumlah hak pilih	Kesbangpol
		Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilwu	Tingkat partisipasi : perbandingan jumlah pemilih dengan jumlah hak pilih	Kesbangpol
4.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Tingkat partisipasi organisasi politik dan kemasyarakatan dalam pembangunan	Perbandingan organisasi politik dan kemasyarakatan yang aktif dengan total organisasi politik dan kemasyarakatan yang ada di kabupaten Cirebon	Kesbangpol
5.	Meningkatnya Penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Tingkat konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon	Jumlah konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon	Kesbangpol

2. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah **Rp 14.011.077.407,48** dengan realisasi sejumlah **Rp 13.136.056.119,00**, atau **93,75%** Sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah **Rp 875.021.288,48**. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN					
5.	BELANJA DAERAH	14.011.077.407,48	13.136.056.119,00	875.021.288,48	93,75%
5.1.	BELANJA OPERASI	13.724.423.041,00	12.852.561.519,00	871.861.522,00	93,65%
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.912.380.000,00	3.588.748.683,00	323.631.317,00	91,73%
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.707.583.041,00	3.538.752.836,00	168.830.205,00	95,45%
	BELANJA HIBAH	6.104.460.000,00	5.725.060.000,00	379.400.000,00	93,78%
5.2.	BELANJA MODAL	286.654.366,48	283.494.600,00	3.159.766,48	98,90 %
5.2.1.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	86.594.000,00	84.582.600,00	2.012.000,00	97,68%
5.2.2.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	199.448.366,48	198.300.000,00	1.148.366,48	99,42%
5.2.3.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	612.000,00	612.000,00	0	100%
JUMLAH BELANJA		14.011.077.407,48	13.136.056.119,00	875.021.288,48	93,75%
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.011.077.407,48)	(13.136.056.119,00)	(875.021.288,48)	93,75%

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Juga Memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

**Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2021**

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	APBN	-	-	-	-
1.1.	KEMENTERIAN	-	-	-	-
2.	APBD Prov Jabar	-	-	-	-
2.1.	Dinas	-	-	-	-

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas target kinerja Tahun 2020 dan 2021.

N O	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama	%	75	80	78	89	81	98
	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	75	85	75	89	80	89
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	%	75	85	75	89	82	99
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	99	100	99	100	91

C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau/desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemeberi penugasan.

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1. Tugas Pembantuan yang diterima

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBN Kementerian dan DPA Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rincian tugas pembantuan yang diterima Inspektorat dapat dilihat pada table berikut :

NO	Bidang Urusan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1		NIHIL		-	-		-	-		
2		NIHIL		-	-		-	-		

Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah sebagai berikut :

(1). Tugas Pembantuan Kementerian

(1). Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

- a. Nihil
- b. Nihil

(2). Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- a. Nihil

(3). Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- a. Nihil

(4). Pengalokasian Anggaran dan Realisasi

a. Nihil

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nihil	-	-	-
2	Nihil	-	-	-

(5). Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Program/Kegiatan	Output	Outcome
1	Nihil	-	-
2	Nihil	-	-

(6). Personil Pelaksana Tugas Pembantuan

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
NIHIL					NIHIL					-

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
NIHIL				NIHIL				-

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa masalah :

a. **NIHIL**

b. **NIHIL**

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan solusi – solusi sebagai berikut :

a. **NIHIL**

b. **NIHIL**

3. Saran dan Tindak Lanjut

NIHIL

4. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

a. **NIHIL**

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Pemerintah Umum.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 6 (enam) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 4.668.608.607,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.290.772.462,-** sisa sebesar **Rp. 377.836.145 ,-** atau tercapai sebesar 91,90 %.

Sementara Urusan Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp.9.342.468.800-** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.845.283.657,-** sisa pagu **Rp. 497.185.143-** atau tercapai sebesar 94,67%.

Secara Keseluruhan di Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan anggaran sebesar **Rp14.011.077.407,48,-** dan terealisasi sebesar **Rp.13.136.056.119-** sisa anggaran sebesar **Rp875.021.288,48,-** atau tercapai sebesar 93,75%.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terinci sebagai berikut :

**Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2021**

U R A I A N	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	Rp. 14.011.077.407,48	Rp.13.136.056.119,00	Rp. 875.021.288,48	93,75%
BELANJA NON URUSAN	Rp .4.668.608.607	Rp.4.290.772.462	Rp.377.836.145	91,90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.668.608.607	Rp .4.290.772.462	Rp.377.836.145	91,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp . 42.024.400	Rp.38.845.800	Rp. 3.178.600	92,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.34.114.600	Rp .31.924.000	Rp. 2.190.600	93,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.909.800	Rp .6.921.800	Rp.988.000	87,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.923.211.700	Rp.3.600.370.383	Rp.322.841.317	91,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3.908.430.000	Rp.3.585.798.683	Rp.322.631.317	91,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 8.356.400	Rp. 8.146.400	Rp. 0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp.6.425.300	Rp.6.425.300	Rp. 0	100,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.197.345.200	Rp.195.816.800	Rp.1.528.400	99,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.532.900	Rp.7.532.900	Rp. 0	100,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 58.872.000	Rp. 57.571.600	Rp.1.300.400	97,79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.102.900	Rp.6.102.900	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.280.000	Rp. 1.280.000	Rp. 0	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 23.956.800	Rp. 23.956.800	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.140.000	Rp.4.140.000	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Rp.28.624.600	Rp.28.396.600	Rp.228.000	99,20
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.11.280.000	Rp.11.280.000	Rp.0	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.55.556.000	Rp. 55.556.000	Rp. 0	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp .210.725 .366	Rp.208.271.000	Rp. 2.454.366	98,83
Pengadaan Mebel	Rp .10.727.000	Rp. 9.421.000	Rp.1.306.000	87,82

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp .199.998.366	Rp.198.850.000	Rp. 1.148.366	99,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp .91.564.320	Rp.56.383.008	Rp.56.383.008	61,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 77.394.320	Rp. 42.213.008	Rp.35.181.312	54,54
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp .14.170.000	Rp .14.170.000	Rp. 0	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 203.737.621	Rp.191.085.471	Rp.12.652.150	93,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.128.509.250	Rp.123.933.000	Rp.4.576.250	96,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.11.740.000	Rp.7.408.100	Rp. 4.331.900	63,10
Pemeliharaan Mebel	Rp.1.806.500	Rp.1.806.500	Rp .0	100,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 61.681.871	Rp .57.937.871	Rp. 3.744.000	93,93
URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA	PERSEN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 9.342.468.800	Rp. 8.845.283.657,-	Rp 497.185.143	94,67
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp .308.034.100	Rp .307.817.400	Rp. 216.700	99,92
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp .308.034.100	Rp .307.817.400	Rp. 216.700	99,92
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.176.115.000	Rp.175.903.300	Rp.211.700	99,87
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 76.337.100	Rp. 76.337.100	Rp. 0	100
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 55.582.000	Rp. 55.577.000	Rp. 5000	99,99
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 4.410.861.000	Rp. 4.339.965.600	Rp.70.895.400	98,39
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 4.410.861.000	Rp. 4.339.965.600	Rp.70.895.400	98,39
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Rp .168.309.700	Rp .168.304.700	Rp.5.000	99,99

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp .4.242.551.300	Rp .4.171.660.900	Rp 70.890.400	98,32

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	Rp .31.722.750	94,54
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	Rp .31.722.750	94,54
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	Rp .31.722.750	94,54
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp .266.964.050	Rp .266.223.050	Rp . 741.000	99,72
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp .266.964.050	Rp .266.223.050	Rp . 741.000	99,72
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 96.624.300	Rp. 96.309.400	Rp. 314.900	99,67
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 133.087.750	Rp.133.011.650	Rp. 76.100	99,94
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 37.252.000	Rp. 36.902.000	Rp. 350.000	99,06

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp .3.775.024.850	Rp .3.381.415.557	Rp 393.609.293	89,57
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Rp .3.775.024.850	Rp .3.381.415.557	Rp 393.609.293	89,57
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 445.604.550	Rp.443.533.275	Rp. 2.071.275	99,53
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 140.800.500	Rp. 140.250.500	Rp. 550.000	99,60
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 488.333.300	Rp. 460.800.732	Rp.27.532.568	94,36

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 200.286.500	Rp. 191.231.050	Rp. 9.055.450	95,47
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.145.600.000	Rp. 354.400.000	85,24
JUMLAH	Rp. 14.011.077.407,48,-	Rp.13.136.056.119,00,-	Rp. 875.021.288,48	93,75%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan)

1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf.dalam rangka melaksanakan urusan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	JUMLAH ALOKASI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
	NON URUSAN	Rp .4.668.608.607	Rp.4.290.772.462	91,90
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.668.608.607	Rp .4.290.772.462	91,90
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp . 42.024.400	Rp.38.845.800	92,43
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.34.114.600	Rp .31.924.000	93,57
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.909.800	Rp .6.921.800	87,50
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.923.211.700	Rp.3.600.370.383	91,77
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3.908.430.000	Rp.3.585.798.683	91,74
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 8.356.400	Rp. 8.146.400	100,0
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SK	Rp.6.425.300	Rp.6.425.300	100,0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.197.345.200	Rp.195.816.800	99,22

1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.532.900	Rp.7.532.900	100,0
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 58.872.000	Rp. 57.571.600	97,79
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.102.900	Rp.6.102.900	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.280.000	Rp. 1.280.000	100,00
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 23.956.800	Rp. 23.956.800	100,00
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.140.000	Rp.4.140.000	100,00
1.3.7	Penyediaan Bahan/Material	Rp.28.624.600	Rp.28.396.600	99,20
1.3.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.11.280.000	Rp.11.280.000	100,00
1.3.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.55.556.000	Rp. 55.556.000	100,00
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp .210.725 .366	Rp.208.271.000	98,83
1.4.1.	Pengadaan Mebel	Rp .10.727.000	Rp. 9.421.000	87,82
1.4.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp .199.998.366	Rp.198.850.000	99,42
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp .91.564.320	Rp.56.383.008	61,57
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 77.394.320	Rp. 42.213.008	54,54
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp .14.170.000	Rp .14.170.000	100
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 203.737.621	Rp.191.085.471	93,78
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.128.509.250	Rp.123.933.000	96,43
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.11.740.000	Rp.7.408.100	63,10
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Rp.1.806.500	Rp.1.806.500	100,0
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 61.681.871	Rp .57.937.871	93,93
	JUMLAH	Rp .4.668.608.607	Rp 4.290.772.462	91,90

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

(1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **Rp 4.668.608.607,-** dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp 4.290.772.462,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp 377.836.146,-** atau tercapai sebesar **91,90%** Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.024.400,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 38.845.800,- sisa pagu anggaran sebesar Rp 3.178.600,- atau tercapai sebesar 92,43%.

Output kegiatan adalah tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Outcome kegiatan adalah meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan akuntabel dan informatif

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.114.600,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 31.924.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp 2.190.600,- atau tercapai sebesar 93,57%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral yang di susun dalam setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan akuntabel dan informatif

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.909.800 dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.921.800 sisa pagu anggaran sebesar Rp 988.000 atau tercapai sebesar 87,50%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang informatif.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.923.211.700,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.600.370.383, Sisa pagu anggaran sebesar Rp 322.841.317 , atau tercapai sebesar 91,77

Output kegiatan adalah tersedianya kegiatan administrasi keuangan selama 1 (satu) tahun.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya disiplin aparatur dan meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.908.430.000 dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.585.798.683 sisa pagu anggaran sebesar Rp 322.631.317 atau tercapai sebesar 91,74%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Gaji dan tunjangan pegawai selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah terpenuhinya Gaji dan tunjangan pegawai selama setahun

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.356.400 dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.8.146.400 sisa pagu anggaran sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Dokumen Pelaporan Akhir Tahun yang di susun

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan penyusunan laporan akhir tahun yang disusun

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.425.300 dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.425.300 sisa pagu anggaran sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD selama setahun

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.345.200,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 195.816.800,-, sisa pagu anggaran Rp. 1.528.400,-, atau tercapai 99,22%

Output kegiatan adalah tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.532.900 dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.7.532.900 sisa pagu anggaran sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Penerangan dan Komponen Instalasi Kantor selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Penerangan Kantor selama setahun

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.872.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.57.571.600,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.1.300.000,- atau tercapai sebesar 97,79%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran selama setahun

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.102.900,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.6.102.900,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran selama setahun

- d. Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.280.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.280.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Bahan Logistik Kantor selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan Logistik Kantor dalam rangka menunjang pelayanan selama setahun

- e. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.956.800,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.23.956.800,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka menunjang pelayanan selama setahun

- f. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.140.000,-

dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.4.140.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan selama setahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan selama setahun

- g. Sub Kegiatan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.624.600,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.28.396.600,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.228.000,-atau tercapai sebesar 99,20%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Bahan/Material selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah terpenuhinya Bahan/Material Kantor selama setahun

- h. Sub Kegiatan Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.280.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.11.280.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya makan minum kunjungan tamu selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kunjungan tamu selama setahun

- i. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.556.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.55.556.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah selama setahun

- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

210.725.366,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 208.271.000,- Sisa pagu anggaran Rp.2.454.366,- atau tercapai 98,83%.

Output Kegiatan adalah tersedianya Barang Milik Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome Kegiatan adalah terpenuhinya Pegadaan Barang Milik Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.727.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.9.421.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.1.306.000,-atau tercapai sebesar 87,82%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Meja dan Kerja Rapat selama 1 (satu) tahun.

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Pemenuhan Pengadaan Mebel selama setahun dalam rangka mewujudkan pelayanan kantor

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.998.366,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.198.850.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.1.148.366,-atau tercapai sebesar 99,42%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Pemagaran Halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Pemenuhan Pemagaran Halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka mewujudkan Kemanan Badan.

- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.564.320,- dengan realisasi Penyerapan sebesar Rp. 56.383.008- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 56.383.008,- atau tercapai sebesar 61,57%.

Output kegiatan adalah tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun.

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.394.320,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.42.213.008,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.35.181.312,- atau tercapai sebesar 54,54%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.170.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.14.170.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.737.621,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 191.085.471,- Sisa pagu anggaran Rp 12.652.150,- atau tercapai sebesar 93,78%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah selama 1 (satu) tahun.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.509.250,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.123.933.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.4.576.250,-atau tercapai sebesar 96,43%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang dibayarkan dan Perbaikan Kendaraan Dinas selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dalam rangka mewujudkan operasional kantor

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.740.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.7.408.100,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.4.331.900,-atau tercapai sebesar 63,10%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Beban Perijinan Kendaraan Dinas yang di bayarkan selama setahun

Outcome Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.806.500.,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.806.500.,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Pemeliharaan Berkala Mebeleur

Outcome Sub Kegiatan adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Berkala Mebeleur

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.681.871,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.57.937.871,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.3.744.000,-atau tercapai sebesar 93,93%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Pemenuhan Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 tidak menemukan permasalahan yang signifikan, dan dapat berjalan lancar

3. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

2. Urusan Pemerintahan Umum

1). Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini merupakan tugas utama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam rangka melaksanakan urusan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp.9.342.468.800-** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.845.283.657,-** sisa pagu **Rp. 497.185.143-** atau tercapai sebesar 94,67%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2021**

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	JUMLAH ALOKASI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 9.342.468.800	Rp. 8.845.283.657,-	94,67

	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.308.034.100	Rp .307.817.400	99,92
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.308.034.100	Rp .307.817.400	99,92
1.1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.176.115.000	Rp.175.903.300	99,87
1.2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 76.337.100	Rp. 76.337.100	100
1.3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 55.582.000	Rp. 55.577.000	99,99
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 4.410.861.000	Rp. 4.339.965.600	98,39
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 4.410.861.000	Rp. 4.339.965.600	98,39
2.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp .168.309.700	Rp .168.304.700	99,99
2.2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.4.242.551.300	Rp .4.171.660.900	98,32
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	94,54
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	94,54
3.1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	94,54
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp .266.964.050	Rp. 266.223.050	99,72

4.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp .266.964.050	Rp. 266.223.050	99,72
4.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 96.624.300	Rp. 96.309.400	99,67
4.2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 133.087.750	Rp.133.011.650	99,94
4.3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 37.252.000	Rp. 36.902.000	99,06

5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp .3.775.024.850	Rp. 3.381.415.557	89,57
5.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Rp .3.775.024.850	Rp. 3.381.415.557	89,57
5.1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 445.604.550	Rp.443.533.275	99,53
5.2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 140.800.500	Rp. 140.250.500	99,60
5.3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 488.333.300	Rp. 460.800.732	94,36
5.4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 200.286.500	Rp. 191.231.050	95,47
5.5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.145.600.000	85,24
	JUMLAH	Rp 9.342.468.800	Rp 8.845.283.657,-	94,67

Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

(1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Alokasi anggaran untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar **Rp. 308.034.100** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 307.817.400** ,- sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 216.700** ,- atau tercapai sebesar 99,92 % Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 308.034.100** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 307.817.400** ,- sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 216.700** ,- atau tercapai sebesar 99,92 %

Output Kegiatan adalah : Terlaksananya kegiatan Pembinaan Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat Kabupaten Cirebon

Outcome Kegiatan adalah : Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 176.115.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 175.903.300,- sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 211.700 ,- atau tercapai sebesar 99,87 %.

Output Sub Kegiatan adalah tersosialisasinya Perundang-Undangan Bagi Pemilih Pemula

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan Pemilih Pemula

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.337.100,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 76.337.100 ,- sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 0 ,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output Sub Kegiatan adalah tersosialisasinya Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat dan mahasiswa di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Pemahaman Ideologi dan wawasan kebangsaan di kalangan Masyarakat dan Mahasiswa di Kabupaten Cirebon

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.582.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 55.577.000 ,- sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5000 ,- atau tercapai sebesar 99,99 %.

Output Sub Kegiatan adalah tersosialisasinya Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Seni dan Budaya di Kabupaten Cirebon

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan Masyarakat melalui kegiatan Sarasehan Seni dan Budaya di Kabupaten Cirebon

(2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar , **Rp 4.410.861.000-** dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 4.339.965.600,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 70.895.400,-** atau tercapai sebesar 98,39 % Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **Rp 4.410.861.000-** dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **Rp. 4.339.965.600,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 70.895.400,-** atau tercapai sebesar 98,39 %

Output Kegiatan adalah : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Cirebon

Outcome Kegiatan adalah : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Cirebon

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.309.700 ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 168.304.700,- sisa Pagu Anggaran sebesar Rp 5.000 ,- atau tercapai sebesar 99,99%

Output Sub Kegiatan adalah Tersosialisasikannya Penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui kegiatan Talkshow Perundang-undangan di Bidang Politik

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Politik di Kabupaten Cirebon

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp 4.242.551.300,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.171.660.900 ,-. Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.895.400 ,- atau tercapai sebesar 98,32 %

Output Sub kegiatan adalah terselenggaranya Bimtek Bendahara Keuangan Parpol di kalangan Pengurus Partai Politik, dan tersedianya Bantuan Keuangan Partai Politik, Terselenggaranya Persiapan Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pilwu Serentak di Kabupaten Cirebon

Outcome Sub Kegiatan adalah meningkatnya Partisipasi Politik di Kalangan Masyarakat Kabupaten Cirebon

(3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 581.584.800** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 549.862.050,-** sisa pagu

anggaran sebesar **Rp. 31.722.750,-** atau tercapai sebesar 94,54%
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 581.584.800** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 549.862.050,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 31.722.750,-** atau tercapai sebesar 94,54%

Output Kegiatan adalah : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon

Outcome Kegiatan adalah : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 581.584.800 ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 549.862.050,-. Sisa pagu anggaran Rp. 31.722.750,- atau tercapai sebesar 94,54 %

Output Sub Kegiatan adalah adanya terlaksananya pembinaan ormas tersedianya laporan verifikasi keberadaan Ormas /LSM yang terdaftar, serta diketahuinya data keberadaan Ormas/LSM secara administrasi dan fisik di lapangan dan terlaksananya monitoring bantuan hibah.

Outcome Sub Kegiatan adalah terbinanya ormas didaerah Kabupaten Cirebon.

(4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya sebesar **Rp. 266.964.050,-** dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp 266.223.050** ,- sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 741.000,-** atau tercapai sebesar 99,72%
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 266.964.050,-** dengan realisasi Penyerapan

Anggaran sebesar **Rp 266.223.050** ,- sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 741.000,-** atau tercapai sebesar 99,72%

Output Kegiatan adalah : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Outcome Kegiatan adalah : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.624.300,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 96.309.400 ,- sisa Pagu Anggaran Rp. 314.900 ,atau tercapai sebesar 99,67%.

Output Sub Kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan Pencegahan Narkotika, dan terlaksananya Koordinasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Cirebon, serta sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Outcome Sub Kegiatan adalah terbangunnya persamaan persepsi antar umat beragama, meningkatnya kesamaan visi dan persepsi masyarakat serta sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.133.087.750,-, dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 133.011.650,- , sisa Pagu Anggaran Rp. 76.100 atau tercapai sebesar 99,94%

Output Sub kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi dan Laporan Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Outcome Sub Kegiatan adalah terciptanya Koordinasi dikalangan masyarakat mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.252.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.36.902.000,-.sisa Pagu Anggaran Rp. 350.000,- atau tercapai 99,06%

Output Sub Kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Monitoring Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Outcome Sub Kegiatan adalah adalah terciptanya harmonisasi di dalam kerukunan umat beragama serta meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

(5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar **Rp. 3.775.024.850** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.3.381.415.557,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 393.609.293** ,- atau tercapai sebesar 89,57 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.775.024.850** ,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.3.381.415.557,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 393.609.293** ,- atau tercapai sebesar 89,57 %.

Output Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Outcome Kegiatan adalah adalah Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon

a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.604.550,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.,- 443.533.275.sisa Pagu Anggaran Rp. 2.071.275,- atau tercapai sebesar 99,53%

Output Sub Kegiatan adalah terlaksananya pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapiter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi

Outcome Sub Kegiatan adalah terciptanya keamanan situasi daerah Kabupaten Cirebon

- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.800.500,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.140.250.500,-, - sisa Pagu Anggaran Rp. 550.000,- atau tercapai sebesar 99,60%

Output Sub kegiatan adalah terbentuknya FKDM Kabupaten Cirebon

Outcome Sub Kegiatan adalah terkoordinasinya FKDM dan terbinanya masyarakat mengenai kewaspadaan dini

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 488.333.300,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 460.800.732,-.sisa Pagu Anggaran Rp. 27.532.568,- atau tercapai sebesar 94,36%.

Output Sub Kegiatan adalah terlaksananya Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda

Outcome Sub Kegiatan adalah terciptanya Koordinasi dan pembahasan Ipoleksosbudhamkam oleh Forkopimda

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.286.500,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. . 191.231.050,-.sisa Pagu Anggaran Rp. 9.055.450,- atau tercapai sebesar 95,47 %.

Output kegiatan adalah terlaksananya Kerjasama dan pencegahan kriminal yang di lakukan dan pengawasan keberadaan orang

asing/Lembaga asing/tenaga kerja asing, serta tersedianya dokumen pelaporan pengawasan orang asing

Outcome kegiatan adalah terkoordinasinya keamanan daerah di Kabupaten Cirebon.

- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000 ,-dengan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.145.600.000,-.sisa Pagu Anggaran Rp. 354.400.000.-, atau tercapai sebesar 85,24 %.

Output kegiatan adalah terfasilitasinya instansi vertikal Forkopimda Kabupaten Cirebon

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dengan Pemkab Cirebon.

2). Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Mulai lunturnya penerapan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, menurunnya pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan menurunnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, rasa toleransi di segala aspek kehidupan serta rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat.
2. Adanya tuntutan dan aksi yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, ormas dan organisasi profesi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi Permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangan tentang keormasan dan wawasan kebangsaan secara intensif kepada seluruh komponen masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan aparat keamanan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana serta pengamanan wilayah.
3. Terus memonitor keberadaan orang asing di Wilayah Kabupaten Cirebon sebagai pencegahan kemungkinan terjadi aksi terorisme dan

melakukan evaluasi keberadaan orang asing tersebut terhadap data anggota jaringan terorisme.

3) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah maka Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah sudah tidak berlaku lagi, maka Pemerintah Daerah harus bisa mendapatkan dan mengatasi sendiri seluruh permasalahan terkait deteksi dini dan cegah dini potensi AGHT kondusifitas wilayah, dengan demikian harus ada perkuatan personil sebagai pelaksana lapangan dan peningkatan kemampuan personil di bidang intelijen pada Badan Kesbangpol untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Minimnya anggaran pada Badan Kesbangpol sangat berpengaruh terhadap kinerja forum-forum yang ada dan tidak sebanding dengan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga perlu adanya peningkatan mata anggaran agar dapat berjalan maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dengan adanya label zona merah pada Kabupaten Cirebon terhadap perkembangan kelompok yang berfaham terorisme dan radikalisme dengan ditandai banyaknya warga Kabupaten Cirebon yang ditangkap karena terlibat terorisme, maka sangat dibutuhkan penanganan yang khusus terhadap sel-sel tidur kelompok radikal maupun eks nabi teroris (napiter) baik secara langsung dilakukan maupun berkerjasama dengan instansi vertikal (unsur Polri dan TNI serta instansi intelijen terkait lainnya) agar tereleminir setiap kegiatan ataupun penyebaran maupun perkembangannya.

Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah melakukan :

a. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dengan membentuk forum koordinasi

atau pelaksanaan kegiatan koordinasi. Bentuk koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1) Forum Koordinasi

- a. FORKOPINDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
- b. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
- c. TKPTRS (Tim Koordinasi Pencegahan Terorisme, Radikalisme dan Sparatisme)
- d. PPWK (Tim Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan)
- e. FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama)
- f. PAKEM (Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat)
- g. NGO (NON GOVERNMENT ORGANIZATION)

2) Materi Koordinasi

a. FORKOPINDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)

Materi Koordinasi :

- 1. Mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah di wilayah Kabupaten Cirebon;
- 2. Melaksanakan analisis berbagai permasalahan baik bersifat umum maupun bersifat khusus dan strategis;
- 3. Memberikan Rekomendasi kepada Bupati Cirebon dalam menentukan kebijakan daerah, menyikapi situasi dan kondisi aspek kehidupanm sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara serta stabilitas nasional dan daerah di Kabupaten Cirebon;
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin kepada Bupati Cirebon;
- 5. Memberikan usul dan masukan terhadap penetapan kebijakan daerah yang berdampak terhadap keamanan dan ketertiban daerah;

b. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Materi Koordinasi :

- 1. Menjaring aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya

pencegahan dan penanggulangannya secara dini;

2. menyelenggarakan forum dialog dengan elemen masyarakat;
3. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
4. menyusun rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

c. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN TERORISME, RADIKALISME DAN SEPARATISME (TIMKOR)

Materi Koordinasi :

1. perencanaan, pengkoordinasian dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;
2. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme, radikalisme dan separatisme di Kabupaten Cirebon;
3. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
4. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme;
5. pelaksanaan penanggulangan yang bersifat pre-emptif, preventif, edukatif dan koordinatif terhadap terorisme, radikalisme dan separatisme;
6. penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan penanggulangan terorisme, radikalisme dan separatisme; pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cirebon.

d. PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)

Materi Koordinasi :

1. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di lingkup Kabupaten Cirebon;
2. menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
4. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
5. melakukan kerjasama dengan Tim PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha;
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

e. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Materi Koordinasi :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atau pedoman pendirian rumah ibadah.

f. PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM)

Materi Koordinasi :

1. Memfasilitasi terlaksananya pemutakhiran data aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan.

2. Memfasilitasi laporan masyarakat dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat yang menyimpang dalam kegiatan pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan.
3. Memfasilitasi penelitian, pengkajian dan penilaian secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya terhadap penodaan agama, norma sosial dan tradisi setempat, kaidah pengobatan, serta norma hukum, bagi ketertiban dan ketenteraman umum.
4. Memberikan bahan saran dan masukan untuk penerbitan ijin praktek pengobatan alternatif, perdukunan, pengobatan tradisional, serta aktifitas ritual aliran kepercayaan yang berkaitan dengan ideologi/keyakinan dan agama.
5. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk intensitas pengawasan aliran kepercayaan serta keamanan dan ketertiban.
6. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah.
7. Memfasilitasi terlaksananya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah/daerah yang memiliki kewenangan fungsional dan kaitan permasalahan dibidang aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, dan perdukunan

g. NON GOVERNMENT ORGANITATION (NGO)

Materi Koordinasi :

1. melakukan kegiatan pelayanan dan pemantauan kunjungan dan kegiatan diplomatik/tamu VIP/Dinas WNA ke Kabupaten Cirebon.
2. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan kunjungan dan Kegiatan Tenaga Ahli/konsultan/Lembaga Asing ke Kabupaten Cirebon.
3. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Kunjungan dan Kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing ke Kabupaten Cirebon.

4. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Kunjungan dan Kegiatan Penelitian Asing ke Kabupaten Cirebon.
5. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan kunjungan dan Kegiatan Artis Ke Kabupaten Cirebon.
6. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Kunjungan dan Kegiatan Rohaniawan Asing ke kabupaten Cirebon.
7. melakukan Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Kunjungan dan Kegiatan LSM Asing (NGO) seKabupaten Cirebon.
8. mendata dan Melakukan Pengawasan terhadap Para Pengungsi di Kabupaten Cirebon.

h. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Materi Koordinasi :

1. merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
2. memfasilitasi hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon;
3. menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
4. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat;
5. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
6. menyusun rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan

3) Instansi vertikal yang terlibat

a. FORKOPINDA

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon
2. Kodim 0620/Kab Cirebon
3. Kejari Kab Cirebon
4. Binda Jabar
5. Bea Cukai Cirebon

6. Imigrasi Cirebon

7. Lanal Cirebon

b. FKDM

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon

2. Kodim 0620/Kab Cirebon

3. Kejari Kab Cirebon

4. Binda Jabar

c. TKPTRS

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon

2. Kodim 0620/Kab Cirebon

3. Denpom III/3 Cirebon

4. Kejari Kab Cirebon

5. Binda Jabar

6. Bea Cukai Cirebon

7. Imigrasi Cirebon

8. Lanal Cirebon

d. PPWK

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon

2. Kodim 0620/Kab Cirebon

3. Perguruan Tinggi

4. MUI Kab Cirebon

e. FKUB

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Kantor Kemenag Kab Cirebon

2. MUI Kab Cirebon

f. PAKEM

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon
2. Kodim 0620/Kab Cirebon
3. Kejari Kab Cirebon
4. Binda Jabar
5. Kantor Kemenag Kab Cirebon

g. Pengawasan Orang Asing / NGO

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon
2. Kodim 0620/Kab Cirebon
3. Kejari Kab Cirebon
4. Imigrasi Cirebon

h. FPK

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah :

1. Polres Cirebon
2. Kodim 0620/Kab Cirebon
3. Kejari Kab Cirebon

4) Hasil dan Manfaat Koordinasi

a. FORKOPINDA

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Meningkatnya silaturahmi dan sinergitas antara Pimpinan di Daerah
2. Terserapnya dan teratasinya permasalahan yang menonjol di wilayah yang dapat mengganggu roda pembangunan dan kondusifitas wilayah
3. Terselenggaranya silaturahmi Forkopinda dan unsur masyarakat

b. FKDM

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Terkoordinasinya fungsi dan kegiatan Aparat Intelejen di instansi vertikal sebagai jaringan intelejen dalam rangka pedeteksian dini dan pencegahan dini permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan deteksi dini potensi ancaman, gangguan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan Aparat Keamanan didaerah, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya upaya deteksi dini dan cegah dini potensi ATHG terhadap kondusifitas wilayah oleh Kassi Trantib Kecamatan dan Aparatur Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Fungsi intelejen di wilayah Kecamatan dalam mengantisipasi permasalahan gangguan kondusifitas.

c. TKPTRS

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Didapatnya informasi, data dan terdeteksi secara dini penyebaran paham terorisme, radikalisme dan sparatisme di kabupaten cirebon;
2. Terlaksananya koordinasi terkait pemantauan dan penanganan serta pencegahan penyebaran paham terorisme, radikalisme dan sparatisme;
3. Terlaksanakanya deradikalisasi terhadap kelompok atau sel tidur kelompok teroris dan radikal.

d. PPWK

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Terlaksananya program peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan dan bela negara dikalangan pelajar, Orkemas dan masyarakat;
2. Teratasinya kendala pelaksanaan program peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara di wilayah.

e. FKUB

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Terdeteksi dan terselesaikannya permasalahan yang berpotensi konflik di internal dan eksternal antar agama;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan kehidupan beragama dilingkungannya.

a. PAKEM

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Didapatkannya data update aliran kepercayaan dan aliran sesat di masyarakat;
2. Terdeteksi dan meminimalisir penyebaran paham aliran sesat dan aliran kepercayaan di masyarakat;
3. Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan adanya aliran sesat dan aliran kepercayaan yang menimbulkan potensi konflik di masyarakat.

g. Pengawasan Kegiatan Orang Asing / NGO

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Diperolehnya data-data perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Terpantaunya kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing dan tamu negara asing baik yang legal dan ilegal di wilayah Kabupaten Cirebon;
3. Terselesaikannya permasalahan yang mengganggu kondusifitas wilayah yang dilakukan oleh orang asing, lembaga asing dan tamu asing baik yang legal maupun ilegal di wilayah Kabupaten Cirebon.

h. FPK

Hasil dan manfaat koordinasi yang dilakukan ialah :

1. Terlaksananya proses pembauran kebangsaan oleh etnis yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Terdeteksi dini dan cegah dini serta terselesaikannya permasalahan yang mengganggu kondusifitas wilayah akibat adanya konflik antar etnis di wilayah;

3. Terciptanya pembauran kebangsaan dan pengenalan budaya berbagai etnis di wilayah Kabupaten Cirebon.

3). Prestasi-prestasi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PRESTASI DALAM BIDANG	LEMBAGA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN	WAKTU (TGL/BLN/THN) PEMBERIAN
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	-	-	-
2.	NIHIL	-	-	-

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP TAHUN 2020

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan rekomendasi LKPJ Tahun 2020 dan ditindak lanjuti oleh kami sebagaimana tabel berikut :

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemerintah Daerah segera menyusun RENCANA STRATEGIS tentang pendidikan politik.	Melalui kegiatan yang sudah terakomodasi dalam Renstra/Renja	Tujuannya untuk Kegiatan yang ada lebih terintegrasi dengan kerangka Rencana Strategi Badan dan agar pelaksanaannya lebih terwadahi Masalah yang diselesaikan adalah terakomodasinya Pendidikan Politik di dalam Renstra dan Renja Badan
2.	Kegiatan pendidikan politik tersebut perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan dan dengan cara yang efektif agar masyarakat sadar politik.	Adanya kegiatan Pembinaan Pendidikan Politik di 2021, melalui sosialisasi Persiapan Pilwu 2021	Tujuan untuk meningkatkan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Persiapan Pilkada Tahun 2024 Masalah yang diselesaikan adalah masih rendah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pilkada
3.	Perlu perklusteran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kesamaan jenis organisasi induknya dan sesuai dengan mitra OPD sehingga bisa bermanfaat dalam sinergitas pembangunan	Dengan adanya Kegiatan Data Base Ormas/Pendataan dan Verifikasi Keberadaan Ormas	Tujuan adalah untuk mengetahui aktivitas ormas yang masih aktif Masalah yang diselesaikan Masih Kurangnya Kesadaran Ormas Mengenai Pelaporan Kegiatan Rutinitas Ormas

	masyarakat.		
4.	Pemberdayaan orkemas oleh OPD dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon melalui berbagai Program Konstruktif.	Dengan adanya kegiatan Pembinaan Ormas di Kabupaten Cirebon	Tujuan agar ormas lebih berdaya dan mandiri dan dapat mememberdayakan anggotanya Masalah Yang diselesaikan Masih Kurangnya Kepatuhan Ormas
5.	Evaluasi rutin terhadap Orkemas penyampaian hasil evaluasi sebagai bagian pembelajaran.	Dengan adanya Pembentukan Tim Pengawasan Ormas	Tujuan agar kegiatan/aktivitas ormas terpantau sesuai dengan Visi/Misi Ormas tersebut. Masalah yang di selesaikan adalah adanya kegiatan Ormas yang meresahkan masyarakat
6	Sosialisasi aplikasi Siormas kepada Orkemas yang produktif.	Pemanfaatan Website Siormas untuk Pelayanan ormas yang optimal	Tujuan agar adanya media Pengaduan Bagi Masyarakat Terhadap Tindakan Ormas Yang Meresahkan Masalah yang di selesaikan adalah Tersampainya Informasi Pengaduan Masyarakat Mengenai Ormas yang Meresahkan

F. PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini disusun, berdasarkan laporan dari masing-masing kegiatan yang ada di Sekretariat dan Bidang-bidang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, baik yang menyangkut fisik maupun keuangan.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan khususnya untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun-tahun selanjutnya.

Penyusunan laporan ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan terutama dalam ketajaman analisis, maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan substansi pelaporan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Sumber, 03 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON**

Dra. Hj.ITA ROHPITASARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198709 2 001